

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yang antara lain:

1. Wardana (2017) “Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Pesisir Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat mempunyai strategi untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Strategi pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut; Man, untuk memaksimalkan SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat mengingat dari segi kuantitas masih belum maksimal, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan stakeholder seperti komunitas, agent, blogger dan membentuk badan promosi pariwisata guna menunjang pemasaran pariwisata. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah dimana penelitian saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif.
2. Berdasarkan penelitian Anismar, Deddy Satria, Muhammad Ali (2018) “Religious Tourism: Concept of Community-Based Tourism in Aceh Singkil, Indonesia” Emerald Reach Proceedings Series Vol. 1 pp. 283–288, (Wisata Religi: Konsep Wisata Berbasis Masyarakat di Aceh Singkil, Indonesia). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil

akurat. Kesimpulan yang didapat yaitu pola dari pengembangan masih dilakukan dengan cara tradisional tanpa keterlibatan pihak swasta. Masyarakat sebagai individu menjalankan bisnis pariwisata tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pendekatan dan metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan Andhika Sutrisno Wibowo (2016) yang berjudul “Analisis Potensi Pengembangan Objek Wisata Alam Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil analisis SWOT, arah prioritas pengembangan objek wisata alam ialah mempertahankan keragaman dan daya tarik wisata dengan cara meningkatkan intensitas perhatian langsung dari pihak berwenang, meningkatkan sarana dan prasarana penunjangberwisata, membuat website khusus untuk mempromosikan objek wisata, dan terakhir merencanakan pengembangan yang terkontrol dan professional dengan memanfaatkan semakin kooperatifnya pihak pemerintah dengan instansi lain. Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah metode yang digunakan deskriptif kuantitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Santoso, Adi Hidayat (2018), yang mengangkat judul “Pengembangan Wisata Berbasis Syariah (Halal Tourism)”. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan (verifikasi) dengan pendekatan menggunakan analisis FGD, RRA, PRA 12 dan analisis SWOT pemetaan pengembangan wisata berbasis syariah (halal tourism) di Kota Bima. Hasil penilaian wisatawan terhadap potensi objek

wisata syariah di Kota Bima sebagian besar menyatakan bahwa Kota Bima memiliki potensi dan kesiapan untuk menjadi destinasi wisata syariah dengan berbagai potensi yang dimiliki, seperti objek wisata alam, wisata budaya, sarana dan prasarana pariwisata, serta dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat lokal Kota Bima. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, namun menggunakan analisis data yang sama yaitu menggunakan analisis SWOT.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.1.1 Peran Pengembangan Obyek Wisata Karangnini Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

#### **2.1.1.1 Pengertian Peran**

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berhasil dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Pengertian peran sebagaimana menurut Soekanto (2015:3) bahwa “Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (*status*) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

maka ia menjalankan satu peran”.

Lebih lanjut menurut Riyadi (2002:138) menjelaskan bahwa : peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

Menurut Soeharto (2015:2) “Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.”

Sedangkan menurut pendapat Ahmadi (2015:3) “Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi badan atau lembaga berdasarkan status atau kedudukannya agar dapat memberikan pengaruh kepada lingkungan di sekitarnya.

### **2.1.1.2 Konsep Peran**

Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.

- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini di landaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).
- e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak

percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

### **2.1.1.3 Hal Yang Mencakup Dalam Peran**

Menurut Levinson (Soekanto, 2015:211) mengatakan peran mencakup tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Selanjutnya Soekanto (Rauf dan Munaf, 2015:99) menyatakan bahwa pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting untuk hal-hal berikut:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan, apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, maka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat melaksanakannya.

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, maka belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

#### **2.1.1.4 Peran Dinas Pariwisata Dalam Pembangunan Obyek Wisata**

Salah satu peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi obyek wisata adalah koordinator. Koordinator yang dimaksud adalah mengatur dan mengkonsepsikan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara mengembangkan potensi obyek wisata dengan cara mempromosikan pariwisata dan pemasaran pariwisata. 1) Wisata Alam Peran pemerintah dalam sebagai koordinator dalam mengelola kegiatan wisata alam di Kabupaten Natuna. Meliputi penyusunan program kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah mengelola kegiatan dalam bidang wisata alam salah satunya melalui kegiatan lomba perahu dayung yang di adakan di Pantai Setai, yang seluruhnya dibiayai oleh Pemerintah.

Di Kabupaten Pangandarna belum banyak kegiatan wisata alam dikarenakan akses yang sangat terbatas, namun kami telah membuat lomba perahu

dayung untuk untuk masyarakat yang di adakan setiap setahun sekali, setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui perencanaan, dan evaluasi”.

Berdasarkan pernyataan tersebut peran pemerintah dalam pengelolaan kegiatan wisata alam sudah cukup baik namun perlu peningkatan, dimana belum banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di objek wisata alam.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Menurut Cox (dalam Pengantar Ilmu Pariwisata, 2009: 81), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: (1) Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan; (2) Proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata; (3) Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal; (4) Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan sosial; (5) Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan atau menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau eksibilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Untuk pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Pangandaran berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2004-2009, dimana Kabupaten Pangandaran

memiliki 21 objek wisata yang terbentang mulai dari utara sampai selatan, dengan jenis objek dan daya tarik wisata yang bervariasi dari Objek Wisata Budaya, Objek Wisata Alam dan Objek Wisata Minat Khusus. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran termasuk kedalam wilayah Pengembangan Pariwisata Priangan, pengembangannya dibagi dalam 6 (enam) Satuan Kawasan Wisata (SKW), yakni SKW Panjalu, Bojong Galuh, SKW Karang Nini, SKW Pangandaran, SKW Parigi dan SKW Batu Karas. Penelitian terpusat pada SKW Pangandaran-Objek Wisata Pantai Pangandaran (Pantai Timur, Pantai Barat & Cagar Alam Pananjung). Segmentasi pasar wisata adalah terhadap wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara dengan berbagai kegiatan wisata antara lain :

- *Berenang/Surfing*
- *Sightseeing*
- *Berkemah/Camping*
- *Penelitian/Research*
- Pendidikan dan pelatihan
- Aktivitas pecinta alam
- Piknik/Rekreasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kondisi produk wisata dan pasar aktual, objek wisata pantai Pangandaran, dalam hal kerusakan sarana prasarana, kesemerawutan pantai cukup kompleks, pantai Pangandaran tengah mencapai fase stagnasi dalam daur siklus hidup objek wisata, dimana fase stagnasi ini harus dapat

diperbaiki sehingga tidak terjerembab dalam waktu singkat dalam fase kemunduran (decline).

## **2.1.2 Tinjauan Tentang Strategi Pembangunan Obyek Wisata**

### **2.1.2.1 Pengertian Pengembangan Obyek Wisata**

Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Claire A. Gunn (1993: 141) yang menegaskan bahwa ada beberapa hal penting di dalam fungsi kebijakan regional dan lokal sebagai alat yang sangat penting di dalam kegiatan kepariwisataan, yaitu antara lain: Pertama, perencanaan harus mampu meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas, membutuhkan perubahan-perubahan yang membangun, disamping pengembangan lokasi yang potensial untuk mengembangkan kualitas atraksi yang dapat dijual. Kedua, kebijakan kepariwisataan harus lebih memiliki peranan penting dari kegiatan promosi, kebijakan tersebut harus didukung oleh penelitian. Ketiga, perencanaan kepariwisataan memerlukan kerjasama publik dan privat agar segala harapan stakeholders bisa terpenuhi. Keempat, perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat memperkuat semua perencanaan, mendukung pembangunan pariwisata yang baik hingga pada tingkat destinasi. Kelima, perencanaan kebijakan regional dan lokal harus dapat merangsang usaha (bisnis) untuk memberikan sumbangsinya kepada pembangunan daerah.

Sebuah destinasi dapat dikatakan akan melakukan pengembangan wisata jika sebelumnya sudah ada aktivitas wisata. Untuk dapat meningkatkan potensi pariwisatanya, yang perlu dilakukan adalah merencanakan pengembangan wisata

agar dapat lebih baik dari sebelumnya. Tiga prinsip utama dalam sustainability development (McIntyre, 1993: 10): 1. Ecological Sustainability, yakni memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan sesuai dengan proses ekologi, biologi, dan keragaman sumber daya ekologi yang ada. 2. Social and Cultural Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar dan sesuai dengan kebudayaan serta nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat tersebut. 3. Economic Sustainability, yaitu memastikan bahwa pengembangan yang dilakukan efisien secara ekonomi dan bahwa sumber daya yang digunakan dapat bertahan bagi kebutuhan di masa mendatang. Sementara itu dilain hal, sektor pariwisata terdiri atas beberapa komponen yang berbeda yang harus benar-benar dimengerti dan direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi.

Objek wisata pantai Pangandaran merupakan objek wisata yang sangat populer di kalangan wisatawan domestik (Nusantara) sebagai daerah tujuan wisata yang sangat kuat, sehingga objek wisata pantai Pangandaran masih memiliki peluang untuk menjadi sebuah destinasi wisata unggulan di Jawa Barat.

#### **2.1.2.2 Tugas Pengembangan Obyek Wisata Oleh Dinas Pariwisata**

Berdasar pada Peraturan Bupati Pangandaran Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, Dinas Pariwisata Kota Surakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pariwisata Kota Surakarta mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggaraan dan pembinaan usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif;
6. Pembinaan pelaku wisata;
7. Penyelenggaraan sosialisasi;
8. Pembinaan jabatan fungsional; dan
9. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
3. Sebagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Sebagian Keuangan;
6. Sebagian Umum dan Kepegawaian.

7. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi:
  8. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
  9. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
  10. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
11. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
  12. Seksi Promosi dan Informasi;
  13. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Pariwisata.
14. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
  15. Seksi Pemanfaatan Ruang Kreatif;
  16. Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
17. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

### **2.1.2.3 Fungsi Pengembangan Obyek Wisata Oleh Dinas Pariwisata**

#### Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

##### Pasal 11

1. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Destinasi wisata budaya, alam dan buatan serta peningkatan daya saing industri pariwisata.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan Destinasi Pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata;
- e. Pelaksanaan administrasi Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
- f. Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan dan bimbingan teknis supervisi di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem, pengembangan destinasi wisata budaya, alam dan buatan, industri pariwisata, tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **2.1.2.4 Tujuan Pengembangan Obyek Wisata**

Tujuan Pengembangan Destinasi Pariwisata :

1. Menyusun dan memantapkan kebijakan nasional pengembangan destinasi pariwisata
2. Meningkatkan pengembangan kebijakan destinasi pariwisata
3. Meningkatkan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata utama berkelas dunia
4. Meningkatnya daya saing usaha pariwisata nasional.
5. Meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara.
6. Menyusun standard dan sistem akreditasi produk dan usaha pariwisata.
7. Mengimplementasikan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi produk dan usaha pariwisata.

Sasaran Pengembangan Destinasi Pariwisata :

1. Tersusun dan terwujudnya pemantapan kebijakan nasional pengembangan destinasi pariwisata.
2. Meningkatkan pengembangan kebijakan destinasi pariwisata.
3. Meningkatkan kebijakan pengembangan destinasi pariwisata utama berkelas dunia.

4. Meningkatnya daya saing usaha pariwisata nasional.
5. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara.
6. Tersusunnya standard dan sistem akreditasi produk dan usaha pariwisata.
7. Terlaksananya pengimplementasian standarisasi, akreditasi dan sertifikasi produk dan usaha pariwisata.

Menurut Barreto dan Giantari (2015:34):

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak.

Sehingga dapat disingkat bahwa Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh

wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Menurut Sastrayuda (2010:6-7) dalam perencanaan pengembangan meliputi:

1. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan Kawasan obyek wisata.
3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang

untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.

### **2.1.3 Potensi Pengembangan Obyek Wisata**

Pangandaran memiliki banyak potensi pariwisata yang belum tergali. Dorongan untuk menjadikan Pangandaran sebagai kabupaten pariwisata pun muncul. Program pembangunan dan pengembangan pariwisata diprioritaskan sebagai bagian terpenting dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Tujuan penelitian adalah (1) Mengetahui dan menganalisis obyek atau daerah tujuan wisata eksisting, (2) Mengidentifikasi dan menganalisis obyek atau daerah/kawasan wisata yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata baru, (3) Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat berkunjung wisatawan ke Kawasan Wisata Pangandaran, serta (4) Menyusun arahan rencana dan strategi pengembangan Kawasan Wisata Pangandaran secara terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: analisis skoring bertujuan untuk mengetahui obyek wisata eksisting dan obyek wisata/daerah yang berpotensi untuk dikembangkan, analisis regresi logistik biner bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat berkunjung wisatawan, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) yang bertujuan untuk menghasilkan arahan rencana pengembangan Kawasan Wisata Pangandaran.

Obyek wisata eksisting yaitu Pantai Pangandaran dengan skor 600, Green Canyon dengan skor 345, Batu Karas dengan skor 50, Cagar Alam dengan skor 30 dan Batu Hiu dengan skor 25. Sedangkan obyek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan yaitu Citumang berada di peringkat pertama dengan skor 688, Karapyak di peringkat ke dua dengan skor 552, Madasari di peringkat ke tiga dengan skor 192. Selanjutnya Karang Nini menduduki peringkat ke empat dengan skor 184, Lembah Putri di peringkat ke lima dengan skor 48, Keusik Luhur di peringkat ke enam dengan skor 16, Palatar Agung dan Karang Tirta di peringkat ke tujuh dan ke delapan dengan skor 0. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berkunjung wisatawan di Kawasan Wisata Pangandaran adalah informasi awal tentang obyek wisata, pemandu wisata, hotel, tipe wisata, dan sarana toilet umum. Rencana dan strategi pengembangan Kawasan Wisata Pangandaran secara terpadu yaitu:

- 1) mengadakan percepatan pembangunan jaringan transportasi dan perbaikan jalan terutama jalan-jalan nasional, provinsi, maupun jalan penghubung ke lokasi wisata dan;

- 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan di lokasi kawasan wisata unggulan

Bagi wilayah Kabupaten Pangandaran, pembangunan dan program pengembangan pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam strategi pembangunan ekonomi. Program pembangunan dan pengembangan pariwisata dapat diprioritaskan sebagai bagian terpenting dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang, menengah, dan jangka pendek, yang meliputi :

- 1) Pengembangan pewilayahan, pengelompokkan obyek wisata, dan daya tarik wisata.

- 2) Pengembangan produk wisata.
- 3) Pengembangan jaringan transportasi/ aksesibilitas antar kawasan, daerah, dan internasional.
- 4) Pengembangan pusat jaringan publik.

Ross (1994) menyatakan bahwa dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata dibutuhkan pertimbangan berdasarkan beberapa unsur dasar yang merupakan sendi model pariwisata. Pertama wisatawan dan perjalanan, artinya orang yang melakukan perjalanan dan bermalam di tempat tujuan. Kedua adalah organisasi dan fasilitas yang dinikmati wisatawan, karena pariwisata itu rumit, luas, dan membawa dampak. Ada lagi dampaknya pada pihak lain atau pihakpihak seperti pemerintah, masyarakat, ekonomi, dan orang lain yang terlibat secara tidak langsung. Perencanaan dan pengembangan suatu kawasan wisata juga membutuhkan perencanaan fasilitasnya, di mana seharusnya fasilitas wisata tersebut dikelompokkan menjadi satu wilayah. Selain itu, wilayah-wilayah khusus harus dibangun untuk menunjang keberadaan fasilitas wisata. Pembangunan fasilitas wisata perlu lebih dari pada sekedar menempatkan bangunan-bangunan, karena sebagian dari daya tarik wisata biasanya terletak pada pusat kota, tempat dengan nilai sejarah, dan sebagainya (Law 1993). Pembangunan dan pengembangan kawasan wisata memiliki dampakdampak terhadap lingkungan. Kondisi lingkungan merupakan atraksi utama bagi wisatawan. Semakin luas wilayah yang digunakan, semakin besar pula dampak yang ditimbulkan. Menurut Marpaung (2002), dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan

pariwisata diantaranya dampak ekonomi, dampak lingkungan, serta dampak sosial dan budaya.

Berdasarkan Rencana dan strategi yang direkomendasikan dalam pengembangan Kawasan Wisata Pangandaran secara terpadu yaitu: (1) Mengadakan percepatan pembangunan jaringan transportasi dan perbaikan jalan terutama jalan-jalan nasional, provinsi, maupun jalan penghubung ke lokasi wisata dan (2) Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan di lokasi kawasan wisata unggulan.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Dalam suatu penelitian perlu adanya kejelasan titik tolak atau landasan berfikir untuk memecahkan dan membahas masalah. Untuk itu perlu disusun suatu kerangka teori sebagai pedoman yang disorot. Penelitian ini berawal dari adanya permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam Strategi Pembangunan Obyek Wisata Karangnini Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu maka pendekatan teori yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini menggunakan kaidah-kaidah ilmu pemerintahan.

Menurut Barreto dan Giantari (2015:34) Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada

suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga dapat disingkat bahwa Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Menurut M. Liga Suryadana dalam Putra (2019:18) ada beberapa komponen dasar pariwisata yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata. Komponen tersebut antara lain:

*a. Daya Tarik (Attraction)*

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai komponen pariwisata karena dapat memunculkan motivasi bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalananwisata. Indikatornya adalah:

- 1) Something to See adalah objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang bisa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata.
- 2) Something to Do adalah agar wisatawan bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, dan relax.
- 3) Something to Buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau ikon dari daerah tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai ole-ole.

*b. Aksesibilitas (Accessibilities)*

Dalam hal ini dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah mencapai tempat wisata tersebut. objek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu objek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan dari sarana dan prasarana objek wisata tersebut. Indikatornya adalah:

- 1) Jalan raya
- 2) Sistem telekomunikasi
- 3) Transportasi
- 4) Pelayanan (pos penjaga objek wisata, pusat informasi)

*c. Fasilitas (Amenities)*

Fasilitas yang tersedia di daerah objek wisata seperti akomodasi dan restoran. Fasilitas menjadi salah satu syarat Daerah

Tujuan Wisata (DTW). Dengan adanya fasilitas, maka wisatawan dapat tinggal lebih lama di daerah tersebut. Indikatornya adalah:

- 1) Fasilitas penginapan (hotel, villa, pondok, restoran)
- 2) Fasilitas kamar mandi umum
- 3) Fasilitas parker

*d. Lembaga Pengelola (Institutions)*

Aspek berikut ini mengacu kepada adanya lembaga atau organisasi yang mengolah objek wisata tersebut. Wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari DTW apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan kenyamanan (Protection of Tourism) dan terlindungi baik melaporkan maupun mengajukan suatu kritik dan saran mengenai keberadaan mereka selaku pengunjung atau orang yang bepergian. Indikatornya adalah:

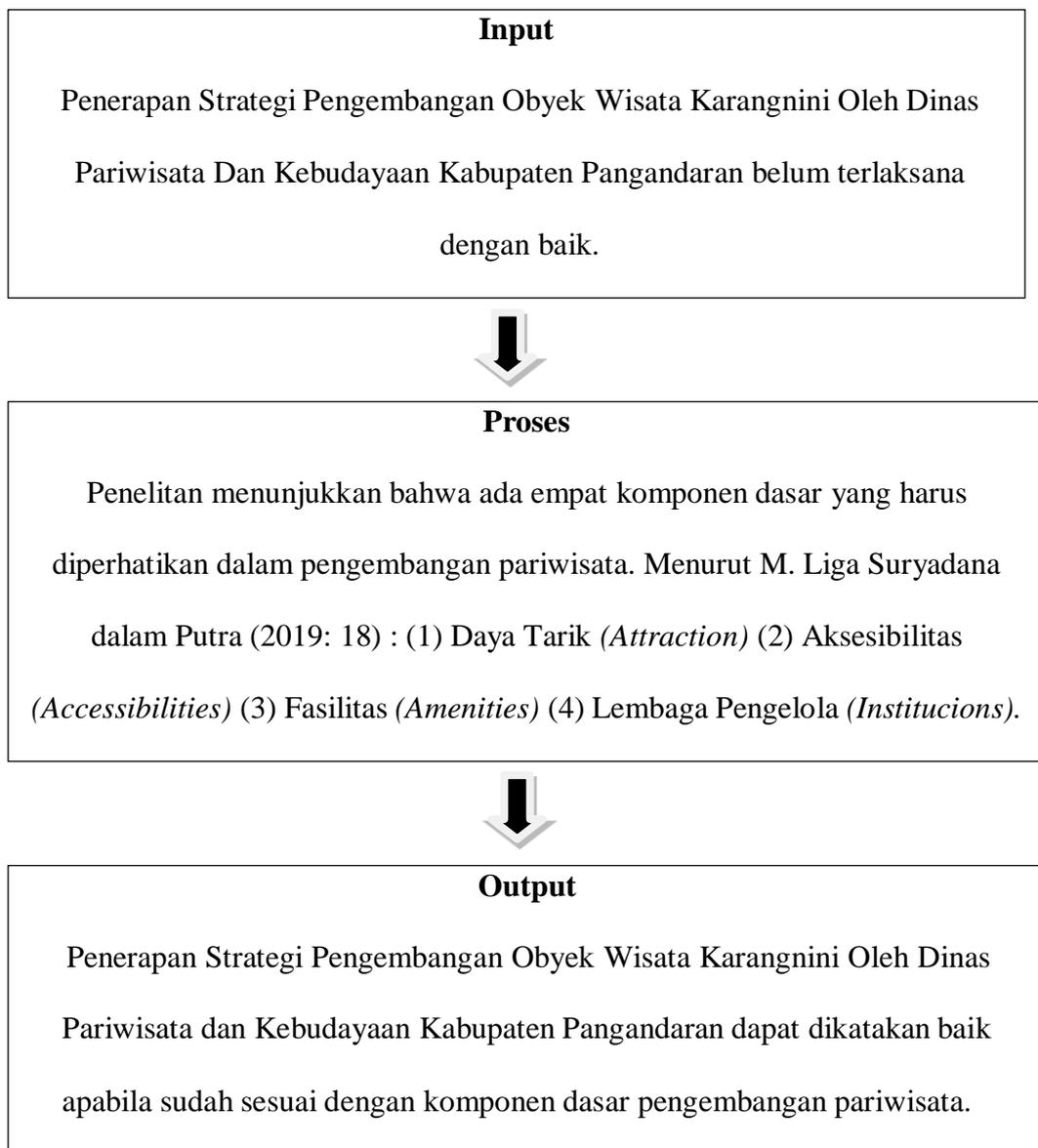
- 1) Pihak pemerintah
- 2) Pihak swasta
- 3) Investor

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.

Dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut :

### **Gambar 1.1**

#### **Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berusaha merumuskan anggapan dasar sebagai berikut :

1. Penerapan strategi pengembangan obyek wisata mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya mencapai pengembangan pariwisata karangnini, akan tetapi strategi pengembangan wisata juga dapat menghambat pengembangan pariwisata.
2. Strategi pengembangan obyek wisata dapat meningkatkan pengembangan wisata apabila penerapannya sesuai dengan komponen dasar pariwisata dalam strategi pengembangan pariwisata.

#### **2.4 Proposisi**

Menurut Barreto dan Giantari (2015:34): Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Menurut Sastrayuda (2010:6-7) dalam perencanaan pengembangan meliputi:

6. Pendekatan Participatory Planning, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
7. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan Kawasan obyek wisata.

8. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
9. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
10. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.